

# ANALISIS PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA

Oleh:  
R. Nurhidayat<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Micro small and medium enterprises (SMEs) have a strategic role in Indonesia's economy. Therefore, this sector requires adequate financial support. By using Granger causality test, this study show that credit to small businesses caused economic growth. The data used in this study from March 2001 to December 2009. Data obtained through the Central Bureau of Statistics, Ministry of Cooperatives and SMEs, as well as Bank Indonesia. This study also found evidence that government-owned banks have been allocated large funds to assist SMEs. However, the credit growth is still less than the credit growth of the foreign and joint banks which are expanding its business into the SME sector. The expansion of foreign and joint banks in the SME sector can be seen from the high growth in credit to this sector. In addition, this study analyzed alternative solutions for financing SMEs. The Government needs to promote microfinance institutions as an alternative solution for SME financing.*

*Keywords: SMEs, credit growth, micro finance institutions, joint banks*

## I. PENDAHULUAN

Pada periode akhir sebelum krisis, perekonomian Indonesia tumbuh hingga 7,8 persen. Bahkan pada awal terjadinya krisis tahun 1997, meskipun turun, perekonomian Indonesia masih tumbuh 4,7 persen. Namun saat krisis mencapai puncaknya tahun 1998, ekonomi mengalami pertumbuhan -13,4 persen dan konsumsi rumah tangga merosot hingga -6,2 persen. Kondisi ini mengakibatkan kelesuan perkembangan unit usaha yang ada. Jumlah unit usaha mengalami penurunan hingga lebih dari 2,95 juta unit. Pada saat itu, hampir semua sistem distribusi dan perdagangan mengalami kemacetan (Soetrisno, 2007).

Dalam kondisi ekonomi yang sulit, ternyata UMKM mampu menyelamatkan usahanya, bahkan memainkan fungsi penyelamatan pada beberapa sub-sektor kegiatan. Koperasi dan usaha kecil berhasil digerakan untuk mengisi berbagai kegiatan usaha yang ditinggalkan. Pemerintah mengambil kebijakan untuk

---

<sup>1</sup> Peneliti pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal

mengembangkan UMKM dengan menggerakkan ekonomi rakyat dan koperasi dalam rangka memulihkan produksi dan distribusi kebutuhan pokok yang mengalami kemacetan. Bahkan dalam perkembangannya, muncul kegiatan UKM baru yang digerakan oleh pengusaha baru yang tergeser dari sektor formal akibat krisis.

Kemampuan UMKM dalam menyelamatkan perekonomian dari krisis telah memberi semangat dunia internasional untuk menjadikan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Hal tersebut terlihat dari antusiasme kalangan UMKM di kawasan Asia-Pasifik yang mengemukakan harapannya pada forum APEC yang dihadiri para menteri yang membidangi UMKM di kawasan tersebut. Pengalaman UMKM dalam menghadapi krisis, keyakinan, dan harapan mereka akan masa depan UMKM merupakan topik yang terus didengungkan hingga saat ini. (Soetrisno, 2007).

Meskipun telah terbukti mampu bertahan dalam keadaan ekonomi yang krisis, tidak berarti UMKM Indonesia tidak memiliki masalah. Terdapat beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh UMKM Indonesia. Lebih jauh dijelaskan oleh Soetrisno (2007) bahwa permasalahan UKM Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya, lebih berpangkal pada aspek permodalan (35 persen), baru kemudian diikuti masalah kepastian pasar, (25,9 persen) dan bahan baku (15,4 persen). Meskipun pada dasarnya, permasalahan modal tersebut merupakan resultante yang diawali dari adanya ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar ini berasal dari ketiadaan jaminan kepastian produksi. Sehingga penyelesaian permasalahan permodalan ini harus sinergi dengan penyelesaian permasalahan lain.

## **II. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Peta UMKM di Indonesia. 2) Arah hubungan antara kredit untuk usaha kecil dengan pertumbuhan ekonomi. 3) Dukungan perbankan terhadap usaha kecil. 4) Gambaran berbagai mekanisme pembiayaan yang dapat diterapkan sebagai solusi alternatif bagi pembiayaan UMKM. Mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM akan pembiayaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.

## **III. TINJAUAN LITERATUR**

Landasan hukum yang memberi pengertian tentang UMKM adalah Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-undang tersebut klasifikasi usaha mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan berdasarkan kriteria aset bersih dan omzet per tahunnya. Sebuah usaha diklasifikasikan sebagai usaha mikro jika memiliki aset bersih sebesar Rp.50.000.000,00 atau memiliki omzet per tahunnya sebesar Rp300.000.000,00.

Untuk usaha kecil, jika memiliki aset bersih di atas Rp.50.000.000,00 hingga Rp.500.000.000,00 atau memiliki omzet lebih dari Rp.300.000.000,00 hingga Rp.2.500.000.000,00. Sedangkan untuk usaha menengah jika memiliki aset bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 hingga Rp.10.000.000.000,00 atau memiliki omzet lebih dari Rp.2.500.000.000,00 hingga Rp.50.000.000.000,00. Kriteria aset bersih di atas diluar tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.

Selanjutnya terkait dengan pola pemberian kredit kepada UMKM, utamanya usaha mikro dan kecil, terdapat beberapa literatur penelitian yang mengkaji topik tersebut. Lehner (2009) melakukan penelitian terkait model pembiayaan individual dan kelompok. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa jenis pembiayaan kelompok sangat tepat dilakukan jika nilai pembiayaan relatif besar, biaya atas pembiayaan tinggi, dan persaingan antar lembaga keuangan mikro relatif rendah. Jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka yang sesuai adalah jenis pembiayaan individual. Yang menarik dari hasil temuan penelitian tersebut adalah prediksi perkembangan kedua jenis pembiayaan tersebut. Dimasa yang akan datang, Jenis pembiayaan individual diprediksi akan lebih banyak digunakan seiring dengan persaingan dan akses mendapatkan modal.

Chowdhury (2005) melalui penelitiannya menjelaskan tentang pentingnya mekanisme pemberian pinjaman secara bergiliran dalam satu kelompok (*sequential financing*) serta mekanisme pengawasan oleh pemberi pinjaman (*lender monitoring*). Bahkan, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun tidak disertakan adanya syarat jaminan bersama, pembiayaan kelompok akan tetap *feasible* sepanjang mekanisme *sequential financing* dan *lender monitoring* diterapkan. Ketidakhadiran *sequential financing* dan *lender monitoring* dapat berakibat fatal dalam pembiayaan kelompok. Si penerima pembiayaan memiliki peluang untuk menginvestasikan dananya tidak sesuai pengajuan awal pembiayaan. Melalui mekanisme *sequential financing*, masing-masing individu dalam kelompok akan secara bersama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek yang didanai oleh pembiayaan yang tahap pertama. Tanpa kesuksesan pembiayaan tahap pertama, pembiayaan selanjutnya tidak akan disetujui.

Wydick (1999) dalam penelitiannya menemukan bahwa ikatan sosial dapat mengurangi timbulnya kegagalan dalam pembiayaan kelompok. Faktor penentu dari kesuksesan pembiayaan kelompok adalah mitigasi terhadap asimetri informasi dalam pembiayaan. Riset yang dilakukan di Guatemala ini memberikan bukti bahwa: ikatan sosial antar anggota kelompok, dan mekanisme pengawasan sesama anggota kelompok (*peer monitoring*) secara signifikan mempengaruhi kinerja pembiayaan yang dilakukan oleh kelompok peminjam. Sedangkan adanya

kelompok internal yang melakukan tekanan untuk melunasi pembiayaan, hanya berdampak kecil dalam mencegah timbulnya *moral hazard*.

#### IV. METODOLOGI

Untuk mengetahui peta UMKM di Indonesia, permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam memperoleh kredit, serta gambaran berbagai mekanisme pembiayaan UMKM akan digunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan untuk mengetahui arah hubungan antara kredit untuk usaha kecil dengan pertumbuhan ekonomi akan digunakan metode *granger causality test*. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta Bank Indonesia. Periode data diperoleh dari bulan Januari 2001 hingga Desember 2009.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Metode ini tidak digunakan untuk mencari suatu kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005). Dengan metode ini diharapkan akan tergambar peta UMKM yang ada di Indonesia termasuk permasalahannya dibidang pembiayaan. Disamping itu juga diharapkan akan diperoleh gambaran berbagai mekanisme pembiayaan yang dapat diterapkan sebagai solusi alternatif bagi pembiayaan UMKM.

#### V. GAMBARAN UMUM

Jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah sangat mendominasi jenis usaha yang ada di Indonesia. Menurut data tahun 2009, dari total unit usaha yang ada, yaitu sebanyak 52.769.280 unit, yang tergolong UMKM mencapai 52.764.603 unit. Angka tersebut merepresentasikan 99,99 persen dari unit usaha yang ada. Jika digunakan Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM, maka data tersebut mengindikasikan mayoritas nilai aset bersih unit usaha di Indonesia berada dibawah Rp.10.000.000.000,00 atau beromzet di bawah Rp.50.000.000.000,00 dalam satu tahun (Gambar 5.1).

**Gambar 5.1.**  
**Jumlah Unit Usaha Tahun 2009**



Disamping jumlahnya yang mendominasi, kebanyakan unit UMKM juga tidak memiliki badan hukum. Menurut Soetrisno (2007), jumlah unit UMKM mencapai 42.298.505 unit pada tahun 2003. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun yang sama menunjukkan jumlah usaha yang tidak berbadan hukum (UMKM) mencapai 15.784.057 unit. Ini artinya kurang lebih 37,31 persen unit UMKM tidak memiliki badan hukum. (tabel 5.1)

**Tabel 5.1.**  
**Jumlah Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Lapangan Usaha 1998-2004**

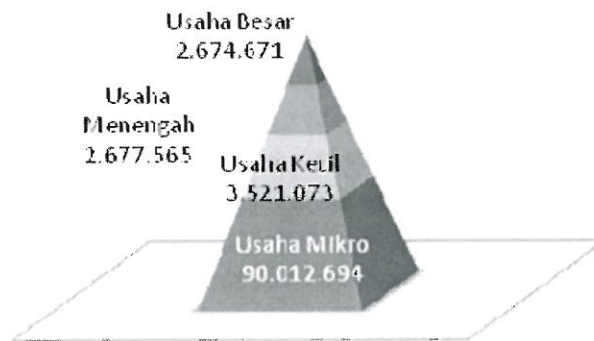
Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Pertambangan dan Penggalian ; Listrik, Gas, dan Penyediaan air ; Konstruksi	237,037	214,334	248,842	287,657	255,824	253,146	256,959
Industri Pengolahan	2,179,064	2,514,816	2,598,704	2,538,283	2,728,700	2,641,909	2,671,660
Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Penyediaan Akomodasi	8,547,130	8,666,569	8,650,713	8,450,211	9,232,631	9,228,487	10,485,974
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1,595,110	1,695,933	1,855,149	1,765,050	1,926,668	2,170,291	2,307,423
Perantara Keuangan ; Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Lainnya	1,415,914	1,428,389	1,627,030	1,619,444	1,559,743	1,490,226	1,423,228
Semua Sektor Kecuali Sektor Pertanian	13,975,255	14,520,041	14,980,438	14,660,645	15,703,566	15,784,059	17,145,244

Sumber : BPS

Angka tersebut di luar sektor pertanian. Jika dilihat komposisinya berdasarkan lapangan usaha, unit UMKM yang tak berbadan hukum paling banyak terdapat di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Penyediaan Akomodasi. Terdapat 58,47 persen unit UMKM yang tidak berbadan hukum pada sektor ini. Bahkan, pernah mencapai 61,16 persen pada tahun 2004.

Hal lain yang menjadi ciri UMKM di Indonesia adalah identik dengan sektor padat karya atau banyak menyerap tenaga kerja. Lebih dari 73 persen tenaga kerja bekerja pada sektor UMKM (lihat Gambar 5.2). Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang terjun di sektor UMKM baru 83.586.616 orang. Kemudian pada tahun 2009, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 96.211.332 orang atau tumbuh 15,1 persen. Berbeda dengan UMKM, pada rentang periode tersebut jumlah usaha besar justru mengalami penurunan sebesar -1,63 persen. Diantara kelompok UMKM, usaha mikro merupakan unit usaha yang paling banyak dan memiliki pertumbuhan paling tinggi. Sepanjang periode 2005 hingga 2009, tenaga kerja pada usaha mikro tumbuh 28,65 persen baru kemudian disusul usaha kecil dan menengah.

**Gambar 5.2.**  
**Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Usaha Tahun 2009**



**Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Skala Usaha tahun 2009**

Sumber : Kementrian Negara Koperasi dan UKM

Disamping merupakan sektor yang padat karya, UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsinya mencapai lebih dari 58 persen dari PDB tahun 2009. Dengan menggunakan harga konstan tahun 2000, PDB di sektor UMKM tahun 2006 mencapai 1.035.615,3 milyar. Kemudian pada tahun 2009 jumlah tersebut menjadi 1.214.725,3 milyar atau tumbuh 17,30 persen. Diantara usaha mikro, kecil dan menengah, usaha mikro merupakan jenis usaha yang memberi kontribusi terbesar. Tetapi sebaliknya, dari sisi pertumbuhan, kontribusi PDB usaha besar ternyata lebih tinggi dibanding dengan UMKM, yaitu mencapai 18,87 persen disusul kemudian oleh usaha menengah, kecil, baru kemudian usaha mikro (tabel 5.2).

**TABEL 5.2**  
**Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar Terhadap PDB, Harga Konstan 2000**  
**TAHUN 2005 – 2009**

	(Milyar)				
	2005	2006	2007	2008	2009
<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>					
- Usaha Mikro	-	588,505.9	620,864.0	655,703.8	682,462.4
- Usaha Kecil (UK)	688,159.7	189,666.7	204,395.4	217,130.2	225,478.3
- Usaha Menengah(UM)	291,341.6	257,442.6	275,411.4	292,919.1	306,784.6
<b>Jumlah A</b>	<b>979,501.3</b>	<b>1,035,615.3</b>	<b>1,100,670.9</b>	<b>1,165,753.2</b>	<b>1,214,725.3</b>
<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>771,314.0</b>	<b>734,893.0</b>	<b>782,878.2</b>	<b>832,184.8</b>	<b>873,567.0</b>
<b>PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (A+B)</b>	<b>1,750,815.2</b>	<b>1,770,508.3</b>	<b>1,883,549.1</b>	<b>1,997,938.0</b>	<b>2,088,292.3</b>

Sumber : Kementrian Negara Koperasi dan UKM

## VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Salah satu pertimbangan utama dari perbankan dalam menetapkan target pertumbuhan kreditnya adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang (Hadad, 2009). Di sisi lain, kredit adalah faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri (yunan, 2009). Untuk melihat kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah kredit yang dikucurkan terutama untuk UMKM (LOANS), penulis menggunakan alat analisis *granger causality test* untuk melihat arah hubungan tersebut. Dalam analisis ini, pertumbuhan ekonomi didekati dengan menggunakan *proxy data industrial production index* (IPI). Berdasarkan data bulanan dari tahun 2001 hingga Desember 2009, hasil uji *granger causality* dengan *software* EViews antara IPI dan LOANS adalah sebagai berikut:

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/19/11 Time: 16:37

Sample: 2001M03 2009M12

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LOANS does not Granger Cause IPI	104	5.52850	0.0053
IPI does not Granger Cause LOANS		1.53402	0.2207

Sumber: Estimasi Penulis

Berdasarkan hasil uji *granger causality* tersebut, terlihat bahwa arah hubungan antara dua variabel tidak dua arah. *LOANS* secara signifikan mempengaruhi IPI, tetapi tidak sebaliknya, IPI tidak mempengaruhi *LOANS*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kredit kepada UMKM akan berpengaruh pada output tetapi tidak sebaliknya. Dengan kata lain, dukungan perbankan kepada UMKM akan memicu pertumbuhan ekonomi. Dukungan tidak hanya dari perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah, tetapi juga swasta dan asing.

Bagaimana keberpihakan perbankan terhadap UMKM terutama usaha kecil dapat dilihat dari pertumbuhan nilai kredit yang diberikan kepada mereka. Untuk mengetahui kondisi tersebut, penulis menggunakan analisis pertumbuhan kredit dengan menggunakan data dari bulan Maret 2001 hingga Desember 2009. Analisis terbagi dalam empat kategori perbankan, yaitu analisis pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan, kemudian yang dimiliki Pemerintah (BUMN), yang dimiliki Pemerintah Daerah (BUMD), yang dimiliki swasta nasional, serta yang dimiliki oleh asing dan campuran. Definisi usaha kecil penerima kredit dalam data tersebut didasarkan pada Undang-undang no 9 tahun 1995, tentang Usaha Kecil. Menurut undang-undang tersebut, usaha kecil adalah mereka yang memiliki kekayaan bersih Rp.200.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling

banyak Rp.1.000.000.000,00 per tahun. Kredit yang diberikan kepada mereka paling banyak Rp. 500.000.000,00.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit dari perbankan kepada usaha kecil secara keseluruhan tumbuh 0,97 persen per bulan. Sementara pertumbuhan kredit untuk usaha kecil pada masing-masing kategori perbankan dapat dilihat pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Pertumbuhan Kredit Usaha Kecil Oleh Perbankan** (persen)

Kategori Kepemilikan Perbankan	Pertumbuhan
Total	0.98
BUMN	1.06
BUMD	0.82
Swasta Nasional	0.87
Asing dan Campuran	5.36

Sumber : CEIC data (diolah)

Untuk kategori perbankan yang dimiliki Pemerintah (BUMN), pertumbuhan kredit untuk usaha kecilnya mencapai 1,06 persen per bulan. Dibanding pertumbuhan total kredit untuk usaha kecil, angka pertumbuhan kredit dari perbankan milik Pemerintah relatif lebih tinggi. Angka tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong usaha kecil dari sisi penyediaan permodalan. Yang menarik adalah fenomena kucuran kredit dari bank asing dan campuran kepada usaha kecil. Pada tabel diatas terlihat pertumbuhan kredit untuk usaha kecil yang tertinggi justru dari perbankan asing dan campuran. Pertumbuhan kredit dari bank asing dan campuran melebihi 5 persen per bulan.

Meskipun sering terdengar informasi bahwa dunia perbankan telah mengalokasikan dana yang cukup besar bagi UMKM, tetapi setiap kali dilakukan *interview* kepada pengusaha kecil tentang masalah yang dihadapi selalu jawabanya adalah masalah permodalan (Soetrisno, 2007). Dalam prakteknya, pembiayaan usaha untuk UMKM pemula (*start up business*) bersumber dari modal sendiri, keluarga, atau sumber lain yang dasarnya adalah kepercayaan dan kegigihan si pelaku usaha. Pada tahap tersebut, pemberdayaan UMKM masih bertumpu pada kemandirian dan kekerabatan. Pada tahap selanjutnya, UMKM yang berkembang akan membutuhkan tambahan modal. Pada tahap ini masuklah pasar keuangan pedesaan melalui koperasi dan program pemerintah. Program tersebut dimaksudkan agar kemampuan UMKM dapat meningkat dan mampu memenuhi syarat untuk beralih dan mendapatkan kredit dari perbankan atau lembaga keuangan formal. (Soetrisno, 2007)

Sebenarnya, sejak tahun 2001, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil yang menganjurkan kepada setiap bank untuk memberikan sebagian kreditnya kepada usaha kecil. Peraturan ini timbul sebagai akibat Pemerintah menluncurkan Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berdampak program pemberian bantuan keuangan dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada UMKM sudah tidak dapat dilakukan lagi. Sejak saat itu perbankan berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui penyaluran kreditnya. Lebih lanjut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/25/PBI/2004 serta SE No.6/44/DPND tentang Rencana Bisnis Bank Umum dalam Penyaluran Kredit UMKM. Dengan adanya ketentuan tersebut, memungkinkan untuk diketahui komitmen perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM (Setyobudi, 2007).

Menurut data dalam tabel 6.2, sudah cukup besar dana yang dialokasikan perbankan untuk keperluan UMKM. Pada tahun 2010, sebanyak 52,48 persen kredit perbankan telah dialokasikan untuk UMKM. Komposisi tersebut relatif tidak banyak berubah sejak tahun 2006. Tetapi, dari total UMKM yang ada hanya 21,8 persen saja UMKM yang dapat menikmati alokasi kredit dari perbankan.

**Tabel 6.2**  
**Alokasi Kredit Untuk Umkm Dan NPL UMKM**  
**Tahun 2006 - 2010**

	(Milyar)				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>TOTAL KREDIT</b>	792,297	1,002,012	1,307,688	1,437,930	1,765,845
- Kredit UMKM	410,442	502,796	633,945	737,939	926,782
Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	51.80%	50.18%	48.48%	51.32%	52.48%
<b>TOTAL NPL</b>	48,057	40,764	41,872	47,548	45,241
- % TOTAL NPL	6.07%	4.07%	3.20%	3.31%	2.56%
- NPL UMKM		17,581	18,803	22,720	24,075
- % NPL UMKM	-	3.50%	2.97%	3.08%	2.60%
- % NPL NON UMKM	-	4.64%	3.42%	3.55%	2.52%

Sumber : Bank Indonesia 2011,  
diolah

Untuk memahami permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan melihat dari dua sisi, UMKM dan perbankan. Terkait interaksinya dengan perbankan, terdapat dua kategori UMKM. Pertama, UMKM yang telah layak mendapat kredit. Kedua, UMKM yang tertolak atau bahkan belum pernah mengajukan kredit. Kategori pertama jumlahnya mencapai 21,8 persen (Rissal, 2006). Dengan asumsi

bahwa persentase tersebut tidak berubah, maka jumlah UMKM kategori kedua adalah 78,2 persen. Kategori kedua inilah yang selama ini luput dari bantuan perbankan karena beberapa alasan.

Dari sisi UMKM, terdapat empat alasan utama penyebab rendahnya tingkat pemanfaatan perbankan oleh UMKM. Alasan pertama, sebanyak 35,06 persen karena prosedur yang sulit. Kedua, tidak ada agunan, 27,63 persen. Ketiga, tidak tahu prosedur, 12,09 persen dan keempat, sebanyak 10,35 persen UMKM menyatakan karena suku bunga tinggi (Said, 2009). Khusus untuk UMKM pertanian, terdapat beberapa alasan mengapa usaha mikro di bidang pertanian tidak mengajukan kredit atau pembiayaan ke perbankan. (1) lebih dari 50 persen menyatakan karena prosesnya yang berbelit-belit; (2) Terdapat kurang lebih 25 persen menyatakan karena tidak ekonomis; (3) 28 persen menyatakan karena lokasi perbankan jauh dari lokasi UMKM (Kusmuljono, 2009)

Disamping itu, ternyata tidak semua UMKM memerlukan bantuan perbankan. Dari semua UMKM yang ada, hanya 64,4 persen yang membutuhkan kredit. Artinya, sebanyak 35,4 persen UMKM tidak memerlukan kredit atau pembiayaan. Dari jumlah UMKM yang membutuhkan kredit, hanya 74 persen yang berniat untuk mengajukan kredit atau pembiayaan. Sisanya sebanyak 26 persen tidak berniat untuk mengajukan kredit karena dua alasan. Yang pertama karena alasan tidak minat dan kedua karena alasan suku bunga tinggi. Dari total UMKM yang berniat mengajukan kredit, hanya 54,1 persen saja yang merealisasikannya. Pada akhirnya hanya 21,8 persen saja UMKM yang layak perbankan dan mendapat persetujuan kredit. (Rissal, 2006)

Jumlah UMKM yang layak perbankan dari aspek yuridis (legalitas/berbadan hukum) hanya 63 persen. Aspek yuridis adalah aspek yang menyangkut masalah legalitas badan usaha termasuk kelengkapan ijin-ijin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Dari total UKM yang ada pada tahun 1998, sebanyak 38 persennya tidak berbadan hukum (lihat tabel 6.3). Persentase tersebut tidak banyak berubah hingga tahun 2003 (37 persen). Bahkan pada tahun 2000 persentase tersebut sempat naik menjadi 39 persen. Ditinjau dari aspek yuridis saja, hanya 63 persen UKM yang berpotensi lolos mendapatkan kredit.

**Tabel 6.3**  
**Rasio UKM Tak Berbadan Hukum terhadap Total UKM**

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Total UKM	36,813,57	37,911,72	38,723,98	39,927,186	41,362,31	42,298,50
UKM Tak Berbadan Hukum*	13,975,25	14,520,04	14,980,43	14,660,645	15,703,56	15,784,05
% UKM Tak Berbadan Huku	38%	38%	39%	37%	38%	37%

\*) Diluar sektor pertanian

Sumber: BPS, Soetrisno.2007-diolah

Dari sisi perbankan, terdapat beberapa alasan mengapa akses UMKM terhadap perbankan rendah. Beberapa diantaranya adalah:

1. Perbankan kurang atau tidak menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM.
2. Pemberian kredit kepada UKM dianggap beresiko tinggi.
3. Biaya transaksi kredit UKM relatif tinggi.
4. UKM kurang bisa memenuhi teknis persyaratan bank teknis (agunan, proposal, dll).
5. Terbatasnya akses UKM terhadap pembiayaan *equity*.
6. Monitoring dan penagihan kredit UKM tidak efisien.
7. Biaya Pelayanan UKM relatif mahal karena bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh pihak perbankan.
8. Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM.

Itulah beberapa hal yang membuat UKM mengalami keterbatasan dalam mengakses kredit atau pembiayaan dari perbankan (Soetrisno, 2007).

Hal lain yang menjadi acuan perbankan dalam penyaluran kredit adalah prinsip kehati-hatian. Penyaluran kredit pada sistem perbankan, tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Ketentuan prinsip tersebut diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI/2004 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi PBR dan beberapa peraturan bank Indonesia lainnya. Ketentuan tersebut memberikan arahan secara jelas agar perbankan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap prinsip-prinsip *prudential banking* yang dikenal dengan 5C (Kusmuljono, 2009), yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kemampuan melunasi kredit (*Capacity to repay*), kondisi ekonomi (*Condition of economy*), dan jaminan atau agunan (*collateral*).

Dengan ketentuan yang demikian, sulit bagi perbankan untuk melayani yang miskin. Kondisi UMKM, khususnya usaha mikro merupakan jenis usaha dengan

skala yang kecil yang umumnya berupa sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual sayur, petani kecil, dan usaha rumah tangga. Mereka mempunyai tabungan dengan peningkatan yang kecil, mampu membayar pinjaman kecil dengan bunga yang memungkinkan (Kusmuljono, 2009). Dengan kondisi yang demikian, sulit bagi UMKM untuk memenuhi target agunan sebagai persyaratan kredit.

Pada dasarnya lembaga perkreditan mikro di Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yaitu formal dan informal. Kelompok pertama atau kelompok formal adalah bank, dalam hal ini yang paling menonjol adalah BRI serta lembaga non bank seperti koperasi, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), dan Pegadaian. Kelompok kedua adalah lembaga keuangan mikro non formal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (USDP) (Iestari, 2006). Berbeda dengan perbankan, sistem lembaga keuangan mikro (LKM) non formal dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM karena memiliki karakteristik: 1) merakyat, yaitu sesuai dengan ritme kehidupan masyarakat, dan memiliki prosedur yang sederhana; 2) Tidak banyak aturan; dan 3) Cepat prosesnya. Dengan kata lain, sistem keuangan mikro merupakan cara baru penyaluran kredit secara cepat untuk para peminjam yang terlalu miskin untuk memiliki aset (Kusmuljono, 2009).

Walaupun tidak mensyaratkan agunan aset, tidak berarti lembaga keuangan mikro mengabaikan prinsip kehati-hatian. Secara umum, terdapat dua *type* pembiayaan yang dilakukan oleh LKM, yaitu pembiayaan kepada individu dan pembiayaan dengan sistem kelompok. Pembiayaan kelompok (*group lending*) merupakan pemberian kredit atas nama sekelompok individu. Dengan mekanisme kelompok ini diharapkan akan terjadi monitoring penggunaan dan oleh rekan satu kelompoknya (*peer monitoring*) serta timbul *group pressure* dimana terjadi penekanan diantara anggota kepada mereka yang gagal bayar untuk dikeluarkan dari group dan tidak akan mendapatkan kredit pada tahap berikutnya. Disamping itu, dalam pembiayaan kelompok harus muncul adanya sanksi sosial yang bakal dikenakan bagi mereka yang gagal bayar karena tidak jujur (Wydick, 1999). Untuk itu, diperlukan adanya *social ties* sebagai persyaratan terbentuknya pinjaman kelompok. Melalui sistem pembiayaan kelompok dengan ketiga unsur tersebut, diharapkan dapat menggantikan fungsi agunan yang tidak dimiliki oleh UMKM.

Beberapa literatur telah menunjukkan bahwa sistem pembiayaan kelompok adalah sistem pembiayaan yang cocok untuk diterapkan kepada masyarakat yang tidak memiliki agunan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diterapkannya pinjaman kelompok. Diantaranya adalah nilai pembiayaan relatif besar, biaya atas pembiayaan tinggi, dan persaingan antar lembaga keuangan mikro relatif rendah (Lehner, 2009), ikatan sosial yang tinggi (Wydick, 1999), pinjaman secara bergiliran dalam satu kelompok (*sequential financing*) serta adanya

mekanisme pengawasan oleh pemberi pinjaman (*lender monitoring*) (Chowdhury, 2005). Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka sistem pembiayaan kelompok tidak akan efektif.

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 99,99 persen dari total usaha yang ada dengan jumlah tenaga kerja mencapai 97 persen. UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 58,2 persen. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja pada sektor ini mencapai 96.211.332 tenaga kerja. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, lebih dari 73 persen tenaga kerja bekerja pada sektor UMKM.
2. Hasil *granger causality test* telah menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya. Sepanjang periode pengamatan dalam penelitian ini, peranan kredit dari perbankan Pemerintah telah cukup besar dalam membantu usaha kecil. Meskipun telah cukup besar, tetapi pertumbuhannya masih kalah dibanding pertumbuhan kredit yang berasal dari perbankan asing dan campuran.
3. Meskipun perbankan telah mengalokasikan dana yang cukup besar bagi UMKM, kurang lebih 52 persen dari total alokasi kredit, tetapi UMKM yang berhasil mendapatkan kredit hanya 21,8 persen. Kondisi ini terjadi karena beberapa alasan baik dari sisi UMKM maupun dari sisi perbankan. Dari sisi UMKM, 35,06 persen mengatakan karena prosedur yang sulit, 27,63 persen karena alasan tidak ada agunan, 12,09 persen tidak tahu prosedur, dan 10,35 persen karena alasan suku bunga tinggi. Bahkan menurut UMKM pertanian lebih dari 50 persen menyatakan karena alasan proses persyaratannya yang berbelit-belit. Disamping itu jumlah UMKM yang layak perbankan dari aspek yuridis (legalitas/berbadan hukum) hanya 63 persen. Dari sisi perbankan, terdapat beberapa alasan mengapa akses UMKM terhadap perbankan rendah, yaitu 1) Perbankan kurang atau tidak menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM; 2) Pemberian kredit kepada UKM dianggap beresiko tinggi; 3) Biaya transaksi kredit UKM relatif tinggi 4) UKM kurang bisa memenuhi teknis persyaratan bank teknis (proposal, dll); 5) Terbatasnya akses UKM terhadap pembiayaan equity; 6) Monitoring dan penagihan kredit UKM tidak efisien; 7) Biaya Pelayanan UKM relative mahal karena bantuan

teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh pihak perbankan; 8) Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM. Disamping itu, Perbankan juga terikat pada ketentuan *prudential banking* yang mensyaratkan adanya agunan dalam pengajuan kredit yang umumnya sulit dipenuhi UMKM.

4. Sistem Lembaga keuangan mikro (LKM) dapat menjadi solusi alternative bagi UMKM dalam memperoleh kredit atau pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan LKM memiliki karakteristik 1) merakyat; 2) Tidak banyak aturan (tidak mensyaratkan agunan); dan 3) Cepat prosesnya. Walaupun tidak mensyaratkan agunan, tidak berarti lembaga keuangan mikro mengabaikan prinsip kehati-hatian. Melalui sistem pembiayaan kelompok yang mengandung tiga unsur, yaitu adanya *peer review*, *group pressure*, dan *social ties*, diharapkan dapat menggantikan fungsi agunan yang tidak dimiliki oleh UMKM.

## 7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi perbandingan antara jumlah dengan kontribusinya terhadap PDB, terlihat produktivitas UMKM masih tergolong rendah. Meskipun selama ini banyak kementerian yang secara tugas pokok bersinggungan dengan UMKM, tetapi belum ada lembaga yang secara khusus melakukan koordinasi antar program pada kementerian tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus yang membidangi UMKM. Satuan tugas ini yang akan menggerakkan kementerian-kementerian yang terkait dengan UMKM untuk secara sinergi melakukan upaya bersama dalam menciptakan profil UMKM Indonesia yang lebih produktif.
2. Pemerintah dapat mendorong partisipasi perbankan yang dimiliki Pemerintah untuk meningkatkan pagu kreditnya kepada usaha kecil. Melalui peningkatan pertumbuhan kredit yang signifikan kepada UMKM diharapkan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
3. Saat ini, diantara perbankan yang ada, perbankan asing dan campuran merupakan perbankan yang tengah melakukan ekspansi ke sektor usaha kecil. Ekspansi tersebut terlihat dari pertumbuhan kreditnya untuk sektor ini. Jika hal ini dibiarkan, akan terjadi persaingan yang tidak sehat antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan LKM dengan perbankan asing dan campuran tersebut. Melalui peningkatan pertumbuhan kreditnya untuk UMKM serta sinergi dengan LKM dalam penyaluran kredit untuk UMKM, perbankan pemerintah (BUMN) dapat meningkatkan daya saingnya sambil tetap menjaga persaingan usaha yang sehat dalam dunia perbankan. Dengan sinergi tersebut, perbankan juga dapat memangkas biaya transaksi yang menjadi kendala

ketika berinteraksi secara langsung dengan UKM. Selain perbankan BUMN, Bank pembangunan daerah diharapkan dapat meniru perbankan BUMN dalam penyaluran kredit usaha kecil. Pertumbuhan kredit perbankan daerah harus dapat ditingkatkan melalui berbagai insentif yang diberikan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penjaminan kredit usaha kecil. Tentu saja hal tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya (DPRD). Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan alokasi sebagian dananya bagi penjaminan tersebut. Melalui penjaminan kredit tersebut, diharapkan perbankan daerah akan terpacu untuk meningkatkan pertumbuhan kredit usaha kecilnya.

4. Pemerintah harus mampu mendorong perbankan yang dimiliki pemerintah (persero) untuk menjadi perbankan yang *leading* dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Melalui sinergi antara perbankan dengan LKM dalam penyaluran kredit kepada UMKM, diharapkan akan meningkatkan jumlah UMKM yang terbantu oleh perbankan. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan aspek *prudential banking*. Disamping itu, Pemerintah juga perlu menggiatkan program bantuan keuangan kepada UMKM melalui lembaga inkubator UMKM.

#### Daftar Pustaka

- 2010. Menegkop: Indonesia Kekurangan LKM. Waspada Online.[http\www.waspadaonline.co.id](http://www.waspadaonline.co.id)
- Bank Indonesia. 2011. *Posisi Pinjaman Rupiah yang diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Kelompok Bank & Lapangan Usaha*.
- Chowdhury, Prabal Roy, 2005. "Group-lending: Sequential financing, lender monitoring and joint liability," *Journal of Development Economics, Elsevier*, vol. 77(2), pages 415-439, August
- Hadad, Muliaman. 2009. *Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2010, BI Menunggu Rencana Kerja Bank 2010*. Kontan, 18 November 2009.
- Kusmuljono, B.S. 2009. *Menciptakan Kesempatan rakyat Berusaha, Sebuah Konsep baru Tentang Hybrid Microfinancing*. IPB Press. Bogor
- Lehner, Maria, 2009. "Group Lending versus Individual Lending in Microfinance," Discussion Papers 299, SFB/TR 15 Governance and the Efficiency of Economic Systems, Free University of Berlin, Humboldt University of Berlin, University of Bonn, University of Mannheim, University of Munich.
- Lestari, Sri. 2006. *Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. Jakarta

- Lukman, S., Lukviarman, N., Rivai HA., Husni, T., Syafrizal, Maruf. *Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat*. Bank Indonesia-Center for Banking Research Universitas Andalas.
- Primiana, Ina. 2009. *Prospek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Disampaikan pada Seminar Indonesia Economic Outlook di Tahun 2010. PP Ikatan sarjana ekonomi Indonesia
- Rissal, Romeo. 2006. *Peranan Bank Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi*. Disampaikan pada Raker DEKOPIN wilayah Sumatera Utara.
- Said, Ali. 2009. *Kendala dan Tantangan Pengusaha UMKM dalam Mengakses Pembiayaan*. Disampaikan pada Seminar Bulanan MES dan BRI Syariah.
- Setyobudi, Andang. 2007. Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Vol. Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007.
- Soetrisno, Noer (2007) *Ekonomi Rakyat-Usaha Mikro & UKM dalam Perekonomian Indonesia: Suatu Pandangan Struktural Alternatif*. Jakarta: SMECDA
- Tambunan, Tulus "Ukuran Daya Saing Koperasi Dan UKM", Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti.
- Thejasukmana, Sucipto. 2010. *Pengaruh Motivasi dan Kognisi Usaha Mikro Anggota Lending Group Terhadap Jenis Peluang Dan Daya Inventif Anggota Lending Group di Wilayah Surabaya*. Surabaya: Univesitas Kristen Petra
- Wydick, Bruce. 1999. "Can Social Cohesion be Harnessed to Repair Market Failures?" *The Economic Journal*, Vol. 109, No. 457: 463-475.
- Yunan. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.